

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan diartikan sebagai usaha untuk memberikan kekuatan atau memperkuat masyarakat. Istilah ini juga merujuk pada upaya untuk memenuhi kebutuhan individu, kelompok, dan komunitas agar mereka memiliki kemampuan untuk membuat keputusan dan mengontrol lingkungan mereka guna mencapai keinginan mereka. Hal ini mencakup akses terhadap sumber daya yang berkaitan dengan pekerjaan dan aktivitas sosial mereka.¹

Menurut Robert Chambers, pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang mengintegrasikan nilai – nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yang berpusat pada manusia, bersifat partisipatif, memberdayakan, dan berkelanjutan. Konsep ini memiliki makna yang lebih luas, tidak hanya mengacu pada pemenuhan dasar atau pencegahan kemiskinan, tetapi juga sebagai upaya untuk mengembangkan pemikiran alternative dalam mencari solusi atas masalah yang terjadi di masa lalu.

¹ Aprillia Teresia, dkk, *Pembangunan Berbasis Masyarakat* (Bandung: Alfabeta, 2015), 115-117.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses partisipatif yang memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengevaluasi tantangan utama dalam pembangunan mereka dan mengusulkan kegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah tersebut. Kegiatan-kegiatan ini kemudian menjadi dasar bagi program-program daerah, bahkan hingga program nasional. Pemahaman ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat ditentukan oleh masyarakat itu sendiri, dengan lembaga pendukung berperan hanya sebagai fasilitator. Pendekatan ini akan mengurangi ketergantungan pada sumber daya eksternal atau yang tidak berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat secara substansial adalah proses restrukturisasi masyarakat yang dilakukan melalui pola swadaya dan partisipasi dalam mengelola dan mengorganisir kehidupan sosial-ekonomi. Proses ini memberikan masyarakat kesempatan untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan lebih baik daripada sebelumnya.² Dalam konteks ini, pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat di tingkat bawah dalam mengidentifikasi kebutuhan mereka, mengakses sumber daya yang diperlukan, dan mendorong mereka untuk bergerak secara kolektif.

Pemahaman ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat ditentukan oleh masyarakat itu sendiri, dengan lembaga pendukung berperan hanya sebagai fasilitator.

² Alfitri, *Community Development: Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 22.

Pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai metode yang memungkinkan individu untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan memperluas pengaruh mereka terhadap proses-proses yang mempengaruhi kehidupan mereka. Menurut Twelvetrees, pemberdayaan masyarakat adalah “*the process of assisting ordinary people to improve their own communities by undertaking collective actions*”. Pemberdayaan masyarakat secara khusus berkaitan dengan upaya memenuhi kebutuhan kelompok yang kurang beruntung atau terpinggirkan, baik karena kemiskinan maupun diskriminasi berdasarkan kelas sosial, suku, gender, usia, dan kecacatan.³

Dalam konteks ini, pemberdayaan berarti peningkatan kualitas hidup atau kesejahteraan individu dan masyarakat, yang mencakup aspek-aspek berikut:

- a. Meningkatkan kondisi ekonomi, terutama dalam hal penyediaan pangan yang cukup.
 - b. Meningkatkan kesejahteraan sosial, seperti pendidikan dan kesehatan.
 - c. Memastikan kemerdekaan dari segala bentuk penindasan.
 - d. Menjamin keamanan.
2. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat dilakukan secara individu, meskipun akhirnya tetap berkaitan dengan aspek

³ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan Pekerjaan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2006), 12.

kolektivitas dengan menghubungkan individu kepada sumber daya atau situasi lain di luar dirinya. Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat diterapkan melalui tiga tingkatan atau dimensi: mikro, mezzo, dan makro.

a. Aras Mikro

Pemberdayaan individu klien dilakukan melalui bimbingan, konseling, *manajemen stres*, dan intervensi krisis. Tujuan utamanya adalah membimbing dan melatih klien dalam menjalani tugas-tugas kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task-centered approach*).

b. Aras Mezzo

Pemberdayaan sekelompok klien dilakukan dengan memanfaatkan kelompok sebagai media intervensi. Strategi seperti pendidikan, pelatihan, dan dinamika kelompok biasanya digunakan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan sikap klien, sehingga mereka mampu memecahkan masalah yang dihadapi.

c. Aras Makro

Pendekatan ini juga dikenal sebagai strategi sistem besar (*large system strategy*), karena perubahan yang diinginkan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Beberapa strategi dalam pendekatan ini meliputi perumusan kebijakan, perencanaan sosial, dan manajemen konflik. Strategi sistem

besar menganggap klien sebagai individu yang mampu memahami situasi mereka sendiri serta memilih dan menentukan strategi yang tepat untuk bertindak, termasuk kampanye, aksi sosial, dan pengorganisasian masyarakat.

3. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan merujuk pada situasi atau hasil yang diharapkan dari perubahan sosial, yaitu terbentuknya masyarakat yang memiliki kekuatan, pengetahuan, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka secara fisik, ekonomi, dan sosial. Ini meliputi rasa percaya diri, kemampuan menyampaikan aspirasi, memiliki pekerjaan, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, serta mandiri dalam menjalankan tugas-tugas hidup mereka.

Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Mengumpulkan individu dengan nasib serupa dalam kelompok dianggap sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif. Hal ini dapat dicapai melalui dialog dan diskusi dalam kelompok belajar, di mana mereka bertukar opini dan emosi, serta belajar untuk mendefinisikan masalah, menganalisisnya, dan mencari solusinya. Proses pemberdayaan masyarakat mencakup hal-hal berikut.⁴

- a. Mengidentifikasi dan menilai potensi wilayah, permasalahan, serta peluang yang ada. Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat dapat mengenali dan menganalisis kondisi mereka dengan

⁴ Totok Mardikanto, P. S, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2019), 125-126.

percaya diri, baik dari segi potensi maupun permasalahan. Pada tahap ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai aspek sosial, ekonomi, dan kelembagaan, proses ini mencakup:

- 1) Proses persiapan pertemuan awal dan teknis yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah setempat sedang berlangsung
 - 2) Persiapan untuk pelaksanaan pertemuan.
 - 3) Pelaksanaan kajian dan penilaian kondisi.
 - 4) Diskusi hasil dan penyusunan rencana tindak lanjut.
- b. Merancang rencana kegiatan kelompok berdasarkan hasil kajian, yang mencakup:
- 1) Prioritasi masalah
 - 2) Analisis solusi
 - 3) Mengidentifikasi sumber daya
 - 4) Perencanaan pelaksanaan
- c. Menerapkan rencana kegiatan kelompok
- Rencana yang telah disusun, dengan dukungan fasilitas dari pendamping, kemudian diimplementasikan dalam kegiatan nyata sambil tetap memperhatikan realisasi dan rencana awal.
- d. Memantau proses dan hasil kegiatan secara terus-menerus dengan pendekatan partisipatif (*Participatory Monitoring and Evaluation/PME*). Proses pemberdayaan masyarakat melibatkan penilaian yang komprehensif pada setiap tahap, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Tujuannya adalah

untuk memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan menghasilkan dampak yang diharapkan. Melalui penilaian ini, kita dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

4. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Prinsip-prinsip pemberdayaan harus menjadi pedoman utama dalam setiap tahap perencanaan sosial. Prinsip-prinsip ini meliputi:

- a. Dalam proses pemberdayaan, masyarakat ditempatkan sebagai subjek yang memiliki kompetensi dan kemampuan untuk mengakses sumber daya, peluang, dan potensi.
- b. Perubahan yang lebih baik dapat terjadi jika masyarakat mau berperan aktif dan melakukan sesuatu.
- c. Keahlian masyarakat terbentuk dari pengalaman hidupnya, terutama yang membuatnya yakin akan kemampuan dirinya.
- d. Perlu ada berbagai macam solusi untuk permasalahan ini.
- e. Proses pemberdayaan adalah dinamis, sinergis, dapat berubah, dan mengalami evolusi seiring waktu.⁵

5. Metode pemberdayaan masyarakat

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, beragam pendekatan dapat diterapkan. Beberapa metode yang umum digunakan antara lain:

⁵ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), 68-69.

a. RRA (*Rapid Rural Appraisal*)

RRA adalah cara cepat untuk menilai kondisi desa. Bedanya dengan metode lain, RRA lebih melibatkan masyarakat setempat. Meski cepat, RRA lebih akurat dari metode survei biasa. Tujuan utama RRA adalah untuk mendapatkan gambaran yang cepat namun akurat tentang kondisi suatu desa. Metode ini memungkinkan para pengambil keputusan untuk mengambil tindakan yang tepat berdasarkan informasi yang terkumpul.

Sebagai suatu teknik penilaian, RRA mengkombinasikan berbagai metode, termasuk:

- 1) Analisis data sekunder
- 2) Observasi partisipatif, melakukan pengamatan langsung sambil berinteraksi dengan masyarakat
- 3) Wawancara mendalam, mengumpulkan data kualitatif melalui wawancara dengan informan
- 4) Visualisasi data, membuat representasi visual data melalui peta dan diagram
- 5) Studi kasus komparatif, membandingkan kasus serupa untuk mendapatkan pemahaman
- 6) Analisis tren temporal, mengidentifikasi perubahan dan kecenderungan dari waktu ke waktu
- 7) Survei cepat, mengumpulkan data kuantitatif melalui kuesioner sederhana

Seringkali terjadi kesalahpahaman dalam memahami konsep partisipasi dalam RRA. Banyak tim peneliti yang hanya melihat partisipasi sebagai kegiatan mengumpulkan data dari masyarakat, padahal partisipasi yang sejati melibatkan masyarakat dalam seluruh tahapan penelitian, mulai dari perencanaan hingga pengambilan keputusan.

b. PRA (*Participatory Rapid Appraisal*) atau Penilaian Desa Seacara Partisipatif

PRA merupakan pengembangan dari RRA dengan penekanan yang lebih kuat pada partisipasi masyarakat. Berbeda dengan RRA yang seringkali didominasi oleh tim peneliti dari luar, PRA melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Peran fasilitator dalam PRA adalah sebagai pembimbing, bukan sebagai sumber pengetahuan tunggal.

PRA merupakan pendekatan pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatasi permasalahan lokal. Melalui proses yang partisipatif, seluruh anggota masyarakat dilibatkan dalam upaya untuk mencapai kesejahteraan bersama.

PRA dilakukan pada tahap awal perencanaan kegiatan dan melibatkan aktivitas berikut:

- 1) Pemetaan wilayah dan kegiatan yang berkaitan dengan topik penilaian kondisi.
- 2) Analisis kondisi, yang mencakup:
 - a) Analisis temporal: melakukan kajian komparatif terhadap kondisi masa lalu, sekarang, dan proyeksi masa depan.
 - b) Analisis perubahan: mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perubahan dan dampaknya terhadap kondisi saat ini.
 - c) Analisis akar masalah: menelusuri penyebab mendasar dari permasalahan yang dihadapi.
 - d) Analisis SWOT: melakukan evaluasi terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terkait dengan setiap alternatif solusi.
- 3) Pemilihan alternatif solusi yang paling layak atau dapat diandalkan (dapat dilaksanakan, efisien, dan diterima oleh sistem sosialnya).
- 4) Rincian mengenai pemangku kepentingan dan peran yang diharapkan dari masing-masing pihak, serta jumlah dan sumber pembiayaan yang diharapkan untuk melaksanakan program atau kegiatan yang diusulkan atau direkomendasikan.

c. FGD (*Focus Group Discussion*) atau Diskusi Kelompok yang Terarah

FGD merupakan teknik pengumpulan data kualitatif yang melibatkan diskusi kelompok terfokus pada topik spesifik di bawah bimbingan seorang moderator.

Pelaksanaan FGD dirancang untuk memfasilitasi diskusi kelompok terarah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan program. Diskusi ini bersifat partisipatif dan dipandu oleh seorang moderator, serta sering kali melibatkan beberapa narasumber yang ahli di bidangnya.

Sebagai metode pengumpulan data kualitatif, FGD memiliki tahapan pelaksanaan yang sistematis, yaitu:

- 1) Perumusan tujuan, menetapkan tujuan spesifik FGD yang sejalan dengan tujuan penelitian atau program.
- 2) Penyusunan pedoman diskusi, merancang pertanyaan yang terstruktur dan relevan dengan topik yang akan dibahas.
- 3) Penentuan peserta, melakukan seleksi peserta yang representative dan memiliki pengetahuan yang relevan
- 4) Preparasi fisik, menyiapkan ruangan diskusi yang kondusif untuk interaksi kelompok.
- 5) Pelaksanaan FGD, memfasilitasi diskusi kelompok secara efektif dan efisien.
- 6) Analisis data kualitatif, mengolah data hasil diskusi untuk memperoleh temuan yang bermakna.

7) Pelaporan hasil, menyusun laporan akhir yang komprehensif, termasuk transkrip diskusi dan lampiran lainnya,

d. PLA (*Participatory Learning and Action*)

PLA merupakan pendekatan baru dalam pemberdayaan masyarakat yang menggabungkan teori dan praktik. Metode ini melibatkan proses pembelajaran, diskusi, dan aksi nyata yang dilakukan bersama-sama oleh masyarakat, perangkat desa.

e. SL atau Sekolah Lapangan (*Farmers Field School*)

Sekolah Lapangan adalah proses pembelajaran partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi, dan melakukan tindakan nyata berdasarkan kondisi lokal. Kegiatan ini dilakukan secara berkelanjutan melalui pertemuan-pertemuan berkala di lapangan.

Sekolah Lapangan ini melibatkan sekelompok masyarakat desa yang dibimbing untuk memahami berbagai masalah di desa mereka. Pemecahan masalah dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, dengan mempertimbangkan kemampuan dan sumber daya yang ada di desa tersebut.⁶

B. Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZIS)

1. Pengertian Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (LAZIS)

Menurut Pasal 17 UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pemerintah mendirikan Badan Amil Zakat

⁶ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2013), 199-204.

Nasional (BAZNAS) untuk mengelola zakat di tingkat nasional. Selain itu, masyarakat juga dapat mendirikan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan persetujuan Kementerian Agama untuk mendukung kegiatan BAZNAS.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang berasal dari masyarakat yang bertugas menghimpun, menyalurkan, serta mendayagunakan dana dari zakat, infaq, shadaqah, dan waqaf. LAZ diwajibkan untuk melaporkan pengelolaan dananya secara berkala kepada BAZNAS, yang secara tidak langsung mengawasi kinerja LAZ.⁷

2. Tugas Pokok Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (LAZIS)
 - a. Pengumpulan atau Penghimpunan

Fundraising adalah upaya aktif untuk mengajak individu, kelompok, atau lembaga lain untuk memberikan sumbangan finansial atau sumber daya lainnya guna mendukung program dan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Penghimpunan dana melibatkan upaya komunikasi yang efektif untuk menyampaikan pesan tentang manfaat dari berdonasi, sehingga dapat menginspirasi *muzakki* untuk memberikan sumbangan yang bernilai bagi program-program sosial.

Dalam rangka meningkatkan penghimpunan dana, LAZ perlu melakukan berbagai kegiatan promosi, seperti menyebarkan informasi melalui media massa, mengadakan

⁷ Pasal 17 dan 18 UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, diakses pada 18 Maret 2024 <https://jatim.kemenag.go.id/>

kampanye sosial, serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Dengan demikian, diharapkan kesadaran masyarakat untuk berzakat akan semakin tinggi dan tujuan untuk membantu *mustahik* dapat tercapai secara efektif.

b. Pengelolaan

فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ ۖ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ
يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, fakir miskin, dan orang dalam perjalanan. Yang demikian itu lebih baik bagi mereka yang mencari keridhaan Allah SWT, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”

Berdasarkan Surat Ar – Rum ayat 38 diatas, menekankan pentingnya pengelolaan dana zakat yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Melalui pengelolaan yang inovatif, diharapkan dana zakat dapat disalurkan kepada mereka yang berhak secara tepat dan tepat waktu, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

c. Penyaluran atau Pentasyarufan

Dalam rangka mencapai tujuan penyaluran ZIS yang optimal, perlu dilakukan mekanisme distribusi yang efektif dan efisien. Penyaluran dana dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, antara lain bantuan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan pokok, bantuan produktif untuk meningkatkan kapasitas ekonomi *mustahiq*, atau investasi dalam proyek-proyek sosial yang berkelanjutan.

C. Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan, menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2009, mencakup aspek keamanan, keselamatan, serta kemakmuran. Penjelasan ini terdapat pada Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 Ayat 1:

“Suatu kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentrangan lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi kewajiban manusia dengan Pancasila”.

Kesejahteraan dapat tercermin dalam kesetaraan pendapatan, ketersediaan akses yang mudah ke pendidikan, serta peningkatan kesehatan secara holistik. Kesetaraan dalam distribusi pendapatan berkaitan dengan ketersediaan lapangan kerja, peluang usaha, dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Ketersediaan pekerjaan dan peluang wirausaha menjadi penting karena mereka memberikan masyarakat kemampuan untuk aktif dalam kegiatan ekonomi, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan mereka.⁸

2. Indikator Kesejahteraan

Menurut data BKKBN tahun 2011, kesejahteraan keluarga dibagi menjadi 5 tingkat, yaitu:

⁸ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memperdayakan Rakyat* (Bandung: PT Refika Pertama, 2015), 86.

a. Keluarga Pra Sejahtera

Keluarga ini masih kekurangan dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar, seperti makanan bergizi, pakaian yang layak, tempat tinggal yang layak, akses ke layanan kesehatan, dan kesempatan untuk bersekolah.

b. Keluarga Sejahtera I

Keluarga ini telah mencapai tingkat kesejahteraan dasar, namun masih terdapat potensi untuk meningkatkan kualitas hidup mereka melalui pemenuhan kebutuhan psikologis seperti gizi, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan spiritual.

c. Keluarga Sejahtera II

Meskipun telah mencapai tingkat kesejahteraan yang cukup, keluarga ini masih memiliki potensi untuk berkembang lebih lanjut melalui peningkatan tabungan, pendalaman pengetahuan agama, partisipasi aktif dalam masyarakat, dan akses yang lebih luas terhadap informasi.

d. Keluarga Sejahtera III

Keluarga ini telah mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi, namun belum sepenuhnya mengaktualisasikan diri melalui kontribusi sosial yang lebih besar, seperti memberikan bantuan finansial secara berkala dan terlibat aktif dalam organisasi kemasyarakatan.

e. Keluarga Sejahtera III Plus

Keluarga ini telah memaksimalkan potensi mereka dalam memenuhi semua aspek kehidupan.⁹

3. Kesejahteraan Dalam Islam

Menurut Imam Al-Ghazali, kesejahteraan dalam Islam tercapai ketika kemaslahatan terpenuhi, yang ditandai dengan tercapainya tujuan syariah. Menurut Al-Ghazali, untuk mencapai kesejahteraan, kita harus menjaga lima hal penting, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta¹⁰

Imam Al-Ghazali menekankan bahwa selain menjaga lima masalah tersebut, mencapai tujuan syariah yang benar juga harus diiringi dengan menolak mafsadah. Mafsadah adalah keburukan yang membawa kerusakan. Menurut Al-Ghazali, mafsadah adalah hal yang dapat menghilangkan (sebagian atau keseluruhan) dari lima *maqashid syariah*.¹¹ Yaitu:

a. Memelihara Agama

Agama Islam memiliki tujuan utama untuk menjaga kemurnian akidah dan kesucian ibadah, serta menjamin kebebasan beragama bagi seluruh pemeluknya.

⁹ Faakhira Nadia Syakina, "Pendapatan Kesejahteraan Rumah Tangga Pembudidaya Lele Di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan", *Jurnal JIIA*, 1(Februari 2019), 62.

¹⁰ Annisa Dinar Rahman dan Siti Inayatul Faizah, "Kesejahteraan Dalam Perspektif Maqashid Syariah Pada Karyawan Badan Amil Zakat Dan Lembaga Amil Zakat Di Kota Surabaya", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 12 (Desember, 2019), 25.

¹¹ Akbar Sarif dan Ridzwan Ahmad, "Konsep Masalah dan Mafsadah menurut Imam alGhazali", *TSAQAFAH Jurnal Peradaban Islam*, 2 (November, 2017), 3.

b. Memelihara Jiwa

Sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, Islam mendorong umat untuk saling tolong menolong dan memperhatikan kesejahteraan sesama, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Salah satu bentuk kepedulian tersebut adalah dengan memastikan ketersediaan layanan dasar yang dibutuhkan untuk menjamin kelangsungan hidup yang sehat.

c. Memelihara Akal

Salah satu tujuan utama hukum Islam adalah melindungi akal sehat manusia. Hal ini dapat diwujudkan melalui akses universal terhadap pendidikan yang berkualitas. Pendidikan memungkinkan individu untuk mengembangkan kapasitas intelektualnya, sehingga mampu membuat keputusan yang rasional dan bertanggung jawab.¹²

d. Memelihara Keturunan

Salah satu tujuan utama Islam adalah menjaga dan memelihara keturunan. Hal ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak anak, akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Dengan memberikan peluang yang sama bagi setiap anak, kita dapat memutus mata rantai kemiskinan.

¹² Ibid., 19.

e. Memelihara Harta Benda

Islam mengajarkan kita untuk menjaga kesejahteraan umat. Salah satu caranya adalah dengan melindungi harta benda dan menciptakan kondisi ekonomi yang stabil. Dengan memberikan akses terhadap peluang ekonomi, kita dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.

Agar kebijakan dan program yang dirancang dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan prinsip-prinsip *maqasid al-syariah*. Hal ini penting untuk memastikan bahwa upaya-upaya dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan tujuan-tujuan luhur Islam. Memahami *maqasid al-syariah* merupakan kunci untuk mencapai kesejahteraan yang sejati dan berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan menerapkan *maqasid al-syariah* dalam kebijakan dan program, kita dapat membangun masyarakat yang adil, makmur, dan harmonis.